

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asy'ari, H. *Konsolidasi Demokrasi: Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta : Thafa Media, 2019.
- Bartolin. *Restructuring Europe: Centre Formation System Building and Political Structuring between the Nation State and the European Union*. New York: Oxford University Press, 2005.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Manan, B. *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Yogyakarta; Pusat Studi Hukum FH UII. 2001.
- Monoarfa, Suharso. *Ibu Kota Negara*. Jakarta: Bappenas, 2020.
- Muta'ali, Lutfi dan Anugerah A. Sahamony. *Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia (Tinjauan Geografi)*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada, 2019.
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
- Siagian, P Sondang. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Soerjono, Soekanto., dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Sumaryadi, Nyoman. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama, 2005.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*: Sinar Grafika, 2023

Jurnal

- Amal, Bakhrul dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Dinamika Ketatanegaraan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 4 (2022)
- Arifin dkk, "Navigating Leadership Transitions: The Challenges and Implications of Interim Authority in Indonesia's Regional Governance", *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1, (2025)
- Baharudin. "Desain Daerah Khusus/Istimewa dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 45, No. 2 (2016).
- Baihaki, Reza Muhammad dan Alif Fachrul Rachman. "Penjelasan Hukum (Restatement) Kedudukan Peraturan Otoritas Ibu Kota Negara Menurut Hukum." *Majalah Hukum Nasional* 52, No. 1 (2022).
- Betria, Ika dan Chandika Sovinthara Rahu. "Society Perception Toward Replacement Government Center From Kuala Lumpur to Putrajaya Malaysia." *Journal of Sumatra Disaster, Geography, and Geography Education* 2, No. 2 (2018).
- Djufri, H.A., dan D.I. Alfaridah, "Aspek Politik Hukum Kewenangan Lembaga Otorita Pemerintah Daerah Khusus IKN Nusantara Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, No. 2, (2025)
- Hadi, Fikri dan Farina Gandryani, "Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah", *Majalah Hukum Nasional* 52, No. 1, (2022)
- Heridana, Dian. "Pemindahan Ibu Kota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan atukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Transformative* 8, No. 1 (2022).
- Idris. "Perencanaan pendidikan dalam konteks desentralisasi pendidikan". *Scolae: Journal of Pedagogy* 3, No 2, (2020).
- Kurniawan, Denis, "Otorita IKN dalam Status Kelembagaan dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat dengan Daerah", *Jurnal Konstitusi* 20, No. 3, (2023).
- Mahdi, Wahyu Laksana. "Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otoritas Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, No. 10 (2022).
- Pradnyawati, I Gusti Ayu Ketut Intan dkk, "Konsekuensi Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang

Ibu Kota Negara Terhadap Prinsip Check And Balances”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, No. 2, (2023)

Rahman, Fathur. “Desentralisasi dan Kekhususan Pemerintahan Daerah di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ketatanegaraan Indonesia* 4, No. 2 (2018).

Riyadi, Bambang Slamet. “Culture of Abuse of Power in Indonesia from the Perspective of Criminology and Law.” *Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020).

Tenritatta, Andi, Lauddin Marsuni, dan Farah Syah Reza, “Analisis Hukum Penyelenggaraan Otoritas Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022”, *Jurnal Dialogica* I, No. 1, (2025)

Triyanam Henni. “Perpindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946.” *Jurnal Pendidikan Sejarah* 1, No.2 (2013).

Usmaya, Deden., Wakidi dan Syaiful M. “Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat Tahun 1948-1949.” *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah* 2, No 1 (2014).

Utari, Anak Agung Adik Sri dan Ni Luh Gede Astariyani, “Politik Hukum Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, No. 2, (2023)

Yahya, Muhammad. “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera.” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 14, No.1 (2018)

Yani, Ahmad. “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, No. 2 (2018).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara.

Skripsi

Agassi, Ecky. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pindahan Ibu Kota Negara*, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2013.

Mardiansyah, M. Riki, *Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia Menurut Politisi di Kota Palembang*, Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2021

Website

BBC News Indonesia, “UU IKN resmi disahkan, Nusantara disetujui jadi nama ibu kota baru,” 18 Januari 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60036335>

Rahayu, Kurnia Yunita, Nikolaus Harbowo & Suhartono, “Kewenangan Khusus Otorita IKN Diperluas.” Kompas.id, 19 September 2023, <https://www.kompas.id/artikel/kewenangan-khusus-otorita-ikn-diperluas>

Riana, Friski, “Rencana Pemindahan Ibu Kota dari Era Soekarno Hingga Jokowi”, artikel dari <https://nasional.tempo.co/read/1200537/rencana-pemindahan-ibu-kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi-full&view=ok>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Dilantik, Presiden: Pilihan dan Kombinasi yang Baik”, 10 Maret 2022, <https://setkab.go.id/kepala-dan-wakil-kepala-otorita-ikn-dilantik-presiden-pilihan-dan-kombinasi-yang-baik/>

Sucipto, “Cegah Tumpang Tindih, Kewenangan Khusus Otorita IKN Diperkuat,” Kompas.id, 15 September 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/15/cegah-tumpang-tindih-kewenangan-kewenangan-khusus-otorita-ikn-diperkuat-dalam-revisi-uu-ikn>